

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Andora, H. *“Penguasaan dan pengelolaan tanah pemerintah: Konsep dan dialektika dalam sistem hukum Indonesia,”* Depok: Rajawali Press, 2021.
- Arba. *“Perspektif hukum agraria nasional dan hukum adat,”* Mataram: Jatiswara, 2019.
- Arizona, Y. *“Konstitusionalisme agraria,”* Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- Bachri, S. *“Hukum agraria kontemporer,”* Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Effendi, T. *“Reformasi agraria dan pembangunan berkelanjutan,”* Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Effendi Perangin. *“Hukum waris,”* Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Gunardi. *“Metode penelitian hukum,”* Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Harsono, B. *“Hukum agraria Indonesia (Edisi Revisi),”* Jakarta: Djambatan, 2018.
- Harsono, B. *“Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan dan pelaksanaannya (Edisi Revisi),”* Jakarta: Djambatan, 2020.
- Hutagalung, A. S. *“Beberapa masalah hukum tanah,”* Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Marzuki, P. M. *“Pengantar ilmu hukum (Edisi Revisi),”* Kencana, 2017.
- Marzuki, P. M. *“Penelitian hukum (Edisi Revisi),”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mertokusumo, S. *“Teori hukum,”* Jatim: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mujiburohman, D. A. *“Hukum acara peradilan tata usaha negara,”* Yogyakarta: STPN Press, 2022.
- Napitupulu, D. *“Hukum agraria,”* Jakarta: UKI Press, 2024.
- Nurasa, A., & Mujiburohman, D. A. *“Pemeliharaan data pendaftaran tanah,”* Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Putri, D. A. *“Pendaftaran tanah pemerintah sebagai barang milik negara,”* Mataram: Jastiwara, 2021.

- Rahayu Subekti, Wiwoho, J., Raharjo, P. S., Prameswari, A. A., & Thoriq, R. M. *"Hukum tanah,"* Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Ramadhani, R. *"Buku ajar hukum pertanahan,"* Medan: UMSU Press, 2024.
- Rashid, F. *"Buku metode penelitian,"* Yogyakarta: Tahta Media Grup, 2022.
- Setyawati, C. E. *"Perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) dalam perspektif hukum ekonomi syariah,"* Yogyakarta: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Shelya Nichatus Sovia, *"Ragam metode penelitian hukum,"* Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Subekti. *"Pokok-pokok hukum perdata,"* Jakarta: Intermasa, 2015.
- Sumardjono, M. S. W. *"Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya,"* Jakarta: Kompas, 2019.
- Sumardjono, M. S. W. *"Regulasi pertanahan dan semangat keadilan agraria,"* Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Supriadi. *"Hukum agraria,"* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Satory, A. *"Metode penelitian hukum,"* Yogyakarta: Tahta Media Grup, 2024.
- Suratman & Dillah, P. *"Metode penelitian hukum,"* Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sutedi, A. *"Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya,"* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suyono Sanjaya & Rahmatiar, Y. *"Dasar-dasar hukum agraria,"* Yogyakarta: K-Media, 2024.
- Wati Rahmi Ria, M. Z. *"Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi hukum Islam,"* Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Yahya Harahap, M. *"Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,"* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. SKRIPSI

- Adenin, S. "Implementasi pembagian harta warisan masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perspektif hukum Islam," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025.
- Ahmad Ainun Najib. "Peran perlindungan negara terhadap hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Aminatsir, A. "Analisis hukum jual beli tanah warisan yang bersengketa: Studi kasus putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN," *Universitas Bosowa Makassar*, 2022.
- Ansar, M. "Status penguasaan atas tanah mana' (tanah warisan) menurut hukum adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang," *Universitas Hasanuddin*, 2022.
- Arizki, L. M. W. "Penyelesaian sertifikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta," *Universitas Mataram*, 2018.
- Darussamin, Z. "Interaksi hukum Islam dan hukum adat: Studi pelaksanaan kewarisan masyarakat Melayu di daerah Siak," *Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Deasy Ayu Sartika Dewi. "Mekanisme dan prosedur pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan jalur lintas selatan di Kabupaten Bantul," *Universitas Brawijaya*, 2018.
- Endang Sri Kawuryan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik," *Universitas Brawijaya Malang*, 2023.
- Erica Yolandita. "Eksistensi hak menguasai negara terhadap penguasaan dan kepemilikan hak atas pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Universitas Mataram*, 2025.
- Ellvirra Sabiella Irfan. "Tinjauan hukum perolehan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan nasional," *Universitas Kristen Indonesia Jakarta*, 2021.
- Firdajasari. "Tinjauan hukum terhadap pemilikan tanah absentee di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.
- Fetronela Grace Julianti. "Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan sebagai alas hak dalam sengketa pertanahan di Kabupaten Luwu," *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2024.

Gusni, T. "Penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi: Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang," *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional RI Yogyakarta*, 2020.

Hendra, R. "Hukum agraria," *Universitas Riau*, 2020.

I Made Supriade. "Studi tentang penegasan konversi hak milik adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur," *Bhumibhakti Adhiguna*, 2019.

Iqbal Pinayungan Munthe. "Kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah menjadi sertifikat hak milik di Desa Siamporik," *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, 2024.

Legioria Esa Renjani. "Pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik terhadap proyek pembangunan jalan Kembayan-Balai Karangan-Entikong-Batas Serawak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019.

Meisy Pramisela. "Hak atas tanah akibat pewarisan terhadap tanah yang belum bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional," *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2018.

Mirza Putri Zailani. "Penyelesaian sengketa tanah warisan yang belum bersertifikat," *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2021.

Mitta Ramadany Wael. "Eksistensi lembaga pengumuman (PP No. 24 Tahun 1997) dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap legalitas sertifikat hak atas tanah," *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta*, 2018.

Muhammad Fahmi Saqifuddin. "Kedudukan hukum tanah terlantar berdasarkan hukum Islam dan hukum agraria nasional," *Universitas Islam Negeri*, 2024.

Munaf, S. "Hak ahli waris dalam harta waris yang tidak diambil ditinjau menurut maqasid syari'ah: Studi kasus di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024.

Nurfachriyana Usman. "Penertiban tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional dan implikasinya kepada masyarakat di Kabupaten Gowa," *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

Prihatama, A. B. "Konsep hak menguasai negara atas tanah dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 perspektif fikih pertanian," *Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2025.

Purnawanti. "Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: Studi kasus terhadap pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat. "Pembuktian dan pengakuan dalam hukum acara perdata," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Pekalongan*, 2017.

Rifki Syafrilla, A. A. "Perlindungan hukum bagi ahli waris dalam proses pendaftaran tanah berdasarkan akta jual beli lama yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2025.

Seylin Bihroy Muhammad. "Praktik pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Sholihah, A. "Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan berkaitan dengan akta pembagian hak bersama (APHB) di Kota Semarang," *Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.

Zikri Darussamin. "Interaksi hukum Islam dan hukum adat: Studi pelaksanaan kewarisan masyarakat Melayu di Daerah Siak," *Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

C. ARTIKEL ILMIAH

Aditia, F., Amaliya, L., & Abas, M. "Perlindungan hukum terhadap hak waris anak di bawah umur dalam penyelesaian sengketa utang piutang ayahnya yang telah meninggal dunia (Studi kasus putusan PN Makassar No. 273/Pdt.G/2025)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, No.1 (2025), 619. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>

Amaliyah, dkk. "Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah," *Hermeneutika* 4, No.2 (2021), 48. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.2145>

Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. A. K. "Kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dari perspektif hukum adat Bali," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, No.2 (2022), 523. <https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>

- Dewi, A. S. "Pengaruh penggunaan website Brisik.id terhadap peningkatan aktivitas jurnalistik kontributor," *Jurnal Komunika* 17, No.2 (2021), 3. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2980>
- Firdaus, R. M. "Perdamaian antara pemerintah dan ahli waris dengan objek tanah yang dikuasai oleh pemerintah untuk kepentingan umum (Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 12/Pdt.G/2020/Pn.Mkm)," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No.2 (2022), 273. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.933>
- Damanik, G. Y. "Perlindungan hukum bagi pemilik tanah dari aparat yang tidak profesional," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, No.2 (2023), 87. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.258>
- Gustaman, M. R. A., Fendri, A., & Elda, E. "Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir," *Rewang Rencang* 6, No.9 (2025), 7. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1833>
- Hardi, I., Warman, K., & Andora, H. "Penguasaan tanah sebagai barang milik daerah oleh Pemerintah Kota Padang," *Unes Law Review* 6, No.1, 1442. <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Indriasari, E. "Perkembangan hak menguasai negara dalam hukum pertanahan nasional," *Jurnal Pembaharu Hukum* 2, No.1 (2021), 2. <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.56>
- Intan, A. P., & Najicha, F. U. "Kajian hukum terhadap ketentuan dan prosedur peralihan waris hak atas tanah," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, No.2 (2021), 210. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1534>
- Jonathan Gerard, M., Gerungan, L. K. F. R., & Pandeiroot, P. A. E. "Hak kepemilikan tanah bagi seorang ahli waris berstatus warga negara asing di Indonesia (Studi kasus putusan nomor: 782 PK/Pdt/2016)," *Lex Administratum* 13, No.1 (2025), 1. <http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>
- Jumiati. "Status hak milik atas tanah fasilitas umum di atas permukiman," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.1 (2025), 29–30. <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>
- Krestianto, A. H., & Abadi, S. "Kepastian hukum terhadap keabsahan peralihan tanah yang belum bersertifikat," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.2 (2025), 344. <https://doi.org/10.24269/ls.v0i0.0000>

- Kusumo Wardhani, D., & Chadijah, S. "Ganti rugi terhadap pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Progresivitas atau regresivitas?," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No1 (2022), 29. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.933>
- Larasati, D., & Baidhowi. "Penyelesaian ganti rugi kepada ahli waris dalam pengadaan tanah tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, No.2 (2025), 339. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3215>
- Lie Ulin Nuha, H. L. "Peralihan hak atas tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris (Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/PDT/2018)," *Indonesian Notary* 3, No.4 (2021), 817. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/37>
- Lempoy, P. G. "Kajian hukum hak atas tanah tanpa sertifikat yang diduduki seseorang menurut Pasal 1963 KUHPerdata," *Lex Crimen* 5, No.3 (2021), 102–103. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Mandigani, A. I. "Analisis hukum terhadap akta jual beli tanah yang tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional," *Officium Notarium* 4, No.2 (2025), 203. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art3>
- Margaretha, N. "Perlindungan hak pemerintah Republik Indonesia atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ganti kerugiannya dikuatkan oleh pengadilan dengan lewat batas waktu," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, No.2 (2022), 1130. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16814>
- Muhammad, A. A. "Mengisi kekosongan hukum: Inovasi dalam pendaftaran tanah berdasarkan hukum waris adat," *Wijaya Putra Law Review* 3, No.2 (2024), 134. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.607>
- Nafisa Auliany, Adhan, S., & Sumarja, F. X. "Analisis perbuatan melawan hukum terhadap tanah sita eksekusi," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, No.4 (2025), 3. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3955>
- Nasrudin, N., Nursari, N., & Jamaludin, J. "Memahami status tanah di Indonesia antara hak milik dan hak menguasai negara," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2 (2025), 66. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.2145>
- Ningtyas, D. C. A. "Hak atas tanah sebagai dasar pembuktian bagi pemiliknya dalam hukum agraria yang didasari UUPA," *Jurnal Penelitian Hukum* 3, No.1 (2023), 30. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1534>
- Nurhadi, D. "Kepastian hukum terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui pewarisan berdasarkan akta pembagian hak waris," *Jurnal Hukum Sasana* 10, No.2 (2024), 192. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2980>

- Pratama, S. "Analisis yuridis sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan ahli waris (Studi kasus putusan nomor: 42/Pdt.G/2022/Pn Bgl)," *Jurnal Jurist Argumentum* 3, No.1 (2025), 17. <http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>
- Rahmadani, A., Martanti, Y., & Anwar, K. "Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terkait sengketa kompensasi yang dibayar tidak sesuai dengan luas tanah bagi pembangunan jalan tol," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, No.1 (2025), 279. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6855>
- Rizky, F. M., & Velentina, R. A. "Larangan pembatasan kuantitatif: Studi kasus Indonesia – importation of horticultural products," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No.2 (2021), 357. <https://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3055>
- Rudy, D. G., & Mayasari, D. A. D. "Keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, No.1 (2021), 168. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Santoso, U. "Kedudukan hak pengelolaan dalam sistem hukum pertanahan nasional," *Jurnal Perspektif* 21, No.2 (2024), 98. <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Sari, K. I., Marniati, F. S., & Sailallah, S. "Perlindungan hukum terhadap ahli waris terkait sertifikat hak milik pihak lain di atas lahan tanah warisan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial* 2, No.2 (2026), 393. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6855>
- Serfiyani, C. Y. "Prosiding Seminar Nasional Kusuma III: Kualitas sumber daya manusia," *Kusuma* 2, No.4 (2026), 210. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>
- Setiawan, M. R., Fakhry, M., & Apriano, M. "Perlindungan hukum kreditor dalam warisan atas harta peninggalan tak terurus menurut sistem waris barat," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No.1 (2021) 116. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Setiawan, M. R., & Anugerahayu, A. A. "Tinjauan kritis pemberian hak pengelolaan di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat," *Jurnal Private Law* 6, No.1 (2026), 20. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>

- Siagian, S. W. "Kedudukan surat keterangan tanah sebagai syarat kepemilikan tanah pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," *Jurnal Notarius* 1, No.2 (2022), 348. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575>
- Slamet, A. "Peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari warisan," *Jurnal Legalitas* 5, No.2 (2020) 118. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3456>
- Sodiki, A. "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan perlindungan hak masyarakat," *Jurnal Konstitusi* 9, No.2 (2012), 287. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>
- Subekti, R., & Tirtayasa, M. "Sengketa tanah di Indonesia dan upaya penyelesaiannya," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, No.6 (2025), 44. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.195>
- Suhartono, D. A. F. "Sistem pewarisan menurut hukum perdata," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, No.3 (2022), 205. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Sutriyadi, S. V. "Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dan penagihan dengan intimidatif oleh perusahaan fintech di Indonesia," *Jurnal Hukum* 12, No.1 (2026), 91. <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.666>
- Syafi'i, A., Marpaung, R., Damanik, M. J., & Sitanggang, T. "Dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris lainnya (Studi kasus di Daerah Gayo Lues)," *Jurnal Mutiara Hukum* 5, No.1 (2022), 8. <https://doi.org/10.51544/jmh.v5i1.5198>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, No.1 (2023), 161. <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Syahri, R. A. "Perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah," *Legal Opinion* 5, No. 2 (2022), 118. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.59>

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 pada tanggal 24 September 1960)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

E. INTERNET

Polemik tanah dan dugaan hibah salah sasaran untuk fasilitas umum di Bali yang menunjukkan bahwa status tanah dan sengketa terkait penggunaan tanah untuk fasilitas umum masih menjadi isu publik. <https://www.nusabali.com/berita/204819/polemik-tanah-di-jimbaran-belum-reda-muncul-dugaan-hibah-salah-sasaran> diakses pada 13 Februari 2026.

Pengadilan putusan bahwa tanah yang dipakai sebagai taman bukan aset pemerintah Kota Bandung kasus ini berhubungan dengan sengketa kepemilikan tanah yang diklaim pemerintah vs ahli waris warga. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7151584/pengadilan-putusan-taman-regol-bukan-aset-pemkot-bandung> diakses pada 13 Februari 2026.

Sertifikat tanah transmigran yang dibatalkan kini dipulihkan oleh pemerintah berita ini mencerminkan isu sertifikasi/pengakuan hak atas tanah yang terkait tindakan pemerintah dalam pengelolaan dan status tanah. <https://voi.id/en/news/558645> diakses pada 13 Februari 2026.